

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Az, Lukman Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah-Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, (Pustaka Pelajar, 2015).
- Bengen DG “Pedoman Teknik Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove”, (Bogor: Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Laut IPB, 2001).
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Dahuri, Rokhmin, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).
- Dikdik Mohammad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).
- Djalal, Hasjim, *Indonesia and the Law of The Sea*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995).
- Lotulung, Paulus Efendie, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- M. Hadjon, Philipus Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).
- Manan, Bagir, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000).
- Martosoewiguo, Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar-Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Massie, Cornelis Djelfie, Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019).
- Muslimin, Amrah, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982).

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sinamo, Nomensen, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Sunarso, Siswanto, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika: 2006).

Suteki, Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

C. Jurnal

Ambariyanto dan Denny, 2012. “*Kajian Pembangunan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang*”, Jurnal Riptek, Vol. 6, No.II.

Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina. 2019. *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 48, No.3.

Amiek Soemarmi, et.al, 2019. “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove*”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4.

Andre Evan Sihombing, Amiek Soemarmi, L Tri Setyawanta R. 2019. *Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah*. Diponegoro Law Journal. Vol 8, No.1.

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia. Edisi IV.

Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah. 2015. *Dekontruksi Urusan Pemerintahan Konkruen Dalam UU Pemerintahan Daerah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17, No. 67.

Dendi Sutarto, 2018. “*Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Perspektif Gender*”, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.2.

Ferina Ardhi Cahyani, Djoko Wahyu Winarno, Albertus Sentot Sudarwanto. *Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol.6, No.2.

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016. “*Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue. 1.

Nuryanto, Haryono, 2017. “*Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Melalui Koperasi Nelayan dan E-Commerce*”, Jurnal Saintek Maritim, Volume XVII No. 1.

Priyanta, 2016. “*Kedudukan Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi*”, *Tadulako Law Review*, Vol 1, No 2.

Soedarsono, T. 2004. Wacana Penegakan Hukum dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Otonomi Daerah (dalam “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove*” *jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, 2019).

William Sanjaya. 2015. *Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Padjadjaran, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2, No.3.

Yerrico Kasworo, “Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal RechtsVinding*, Mei 2017.

D. Seminar

Poernomosidhi. Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana; Materi Seminar Nasional: Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir di Indonesia sebagai Antisipasi Risiko Bencana. Bandung, 2007.

E. Internet

<http://kbbi.web.id/wewenang> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 26 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.

[http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan konservasi/details/1/13](http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan_konservasi/details/1/13) diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

[http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan konservasi/details/1/81](http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan_konservasi/details/1/81) diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 09.15 WIB.

[http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan konservasi/details/1/82](http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan_konservasi/details/1/82) diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

<http://tnkarimunjawa.id/profil/index> diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 08.00 WIB.

http://www.ppkkp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_info/296 diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 19.30 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

<https://jateng.bps.go.id> diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 20.00 WIB.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-tengah> diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

<https://oss.pekalongankota.go.id/index.php/id/kota-pekalongan/2016-05-0103-05-52/bidang-perikanan-dan-kelautan> diakses di Semarang pada tanggal 16 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

F. Sumber Lainnya

Iskrok, Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung, Malang, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013.

Yonvitner, Handoko, Ernik, “Modul Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir”.

